



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KINERJA

2022



KANWIL DJKN
BALI DAN NUSA TENGGARA



PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusatenggara dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja dimaksud sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada Tahun 2022. Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya dan DJKN pada khususnya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil DJKN Balinusra dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala Kanwil DJKN Balinusra Tahun 2022. Dalam LAKIN 2022 dilakukan berdasarkan hasil capaian IKU seluruh kinerja Kanwil DJKN Balinusra sesuai dengan Peta Strategis Kanwil Balinusra Tahun 2022.

Harapan kami LAKIN Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban, sebagaimana harapan pengguna layanan dalam peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah mencapai pada angka 111,70 %.

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Denpasar, 6 Februari 2022

Pt. Kepala Kantor,



Mahyu Nendro

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat didalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 263/PMK.01/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, melakukan bimbingan teknis, melakukan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk mampu menghadirkan sikap yang prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang harus selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun sebagai cerminan dari salah satu prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *good governance*.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Selain melaksanakan tugas yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud Kanwil mempunyai fungsi antara lain :

Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) yang dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, Lelang, Umum dan Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi,
- b. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian Piutang Negara ;

- c. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang Kekayaan Negara, penilaian, Piutang Negara dan Lelang;

b. Struktur Organisasi

- a. Berdasarkan PMK nomor 263/PMK.01/2016 tentang perubahan atas PMK nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, Kanwil DJKN terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
 - c. Bidang Penilaian;
 - d. Bidang Piutang Negara ;
 - e. Bidang Lelang;
 - f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

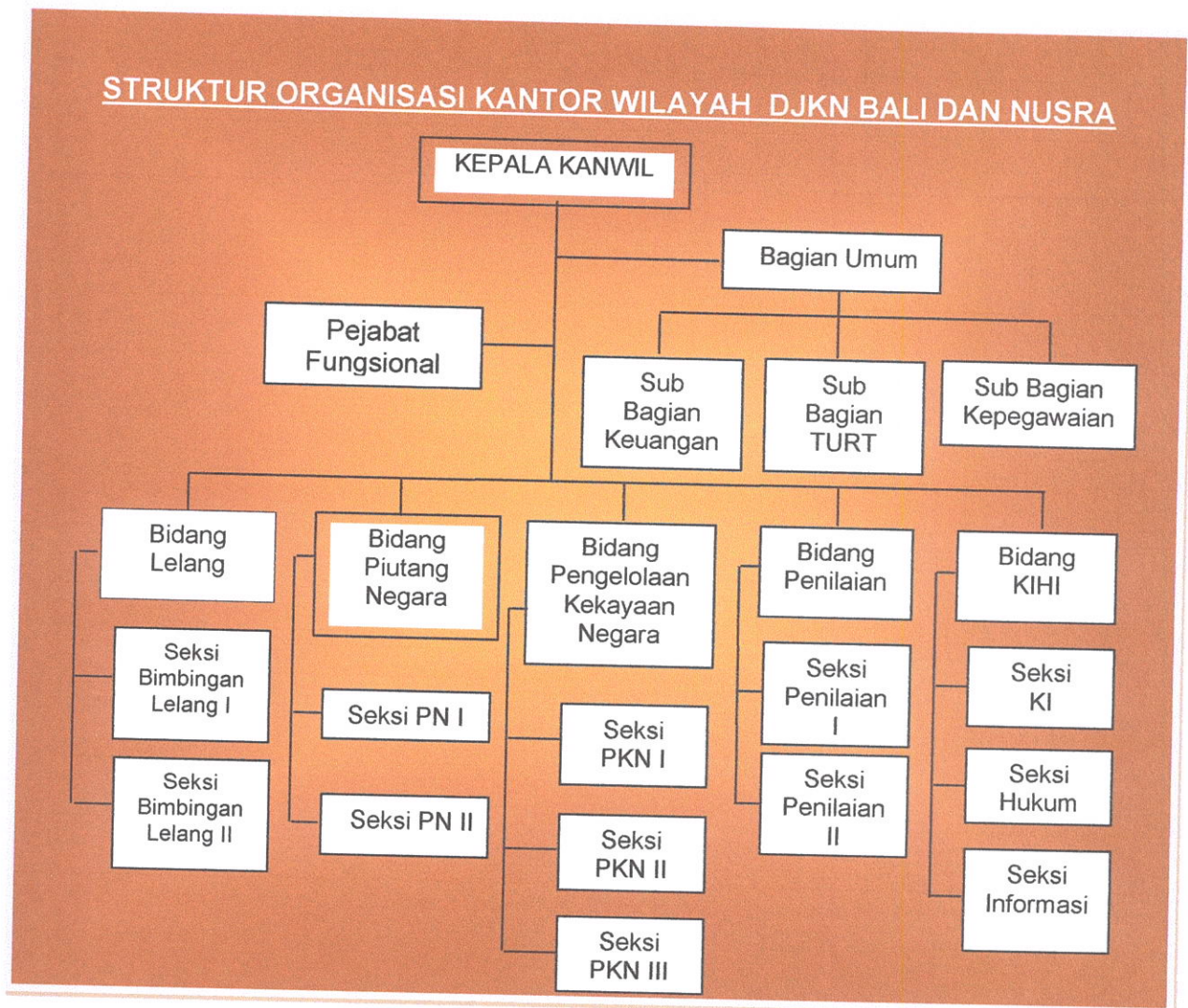
Adapun wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra meliputi 3 provinsi yaitu :

1. Propinsi Bali,
2. Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan
3. Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara membawahi 5 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu :

1. KPKNL Denpasar;
2. KPKNL Singaraja;
3. KPKNL Mataram;
4. KPKNL Bima dan
5. KPKNL Kupang.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini :



Sumber daya manusia yang ada di wilayah Kanwil DJKN Bali & Nusra sampai dengan akhir tahun 2022 untuk mendukung tugas dan fungsi DJKN sebanyak 160 pegawai masing-masing terdiri dari pegawai Kanwil sebanyak 40 pegawai, KPKNL Denpasar sebanyak 37 pegawai, KPKNL Singaraja sebanyak 28 pegawai, KPKNL Mataram sebanyak 29 pegawai, KPKNL Bima sebanyak 26 pegawai dan KPKNL Kupang sebanyak 33 pegawai dengan komposisi per Golongan, Jabatan dan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel : 1.1 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali & Nusra per Golongan)

SATKER/GOLONGAN	GOL.IV	GOL.III	GOL II	Jumlah
KANTOR WILAYAH	15	21	4	40
KPKNL DENPASAR	4	29	4	37
KPKNL SINGARAJA	3	18	7	28
KPKNL MATARAM	1	18	10	29
KPKNL BIMA	2	16	8	26
KPKNL KUPANG	1	22	10	33

Tabel : 1.2 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali & Nusra per jabatan)

	JABATAN				
	ESELON II	ESELON III	Kelompok Pejabat Fungsional	ESELON IV	PELAKSANA
KANTOR WILAYAH	1	6	3	15	16
KPKNL DENPASAR	0	1	11	5	20
KPKNL SINGARAJA	0	1	6	5	16
KPKNL MATARAM	0	1	7	5	16
KPKNL BIMA	0	1	5	5	15
KPKNL KUPANG	0	1	6	5	21

Tabel : 1.3 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali & Nusra sesuai pendidikan)

	PENDIDIKAN						
	S3	S2	S1	D3	D1	SMU	SMP
KANTOR WILAYAH	2	13	16	2	3	3	1
KPKNL DENPASAR	-	6	20	6	3	1	1
KPKNL SINGARAJA	-	3	11	8	2	4	-
KPKNL MATARAM	-	1	17	6	1	3	1
KPKNL BIMA	-	2	14	8	1	1	-
KPKNL KUPANG	-	2	16	7	3	5	-

C. Peran Strategis

Sebagai unit eselon II di Lingkungan DJKN, Kanwil DJKN Balinusra, diberi tanggung jawab untuk mengawal dan mewujudkan **visi** dan **misi** DJKN yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;

- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Guna mengimplementasikan optimalisasi tercapainya tujuan tersebut maka peran Kanwil DJKN Balinusra dalam membangun citra baik bagi *stakeholders* sangat diharapkan.

1. Bagian Umum

Peran Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah terwujudnya urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan Kanwil yang tertib dan lancar.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Bidang PKN dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kekayaan Negara, serta pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada KPKNL di lingkungan Kanwil secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Bidang Penilaian

Peran Bidang Penilaian dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah Terwujudnya bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian yang cepat, tepat, dan cermat di lingkungan Kanwil.

4. Bidang Piutang Negara

Peran Bidang Piutang Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah Terwujudnya bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul

penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara secara baik sehingga tercapai pengurusan Piutang Negara yang optimal.

5 Bidang Lelang

Peran Bidang Lelang dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang di lingkungan Kanwil yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6 Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIH)

Peran Bidang KIH dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah mendukung terwujudnya bahan bimbingan dan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan implementasi pengelolaan kinerja, pemantauan dan penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur, koordinasi dan implementasi manajemen risiko pada Kanwil, koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, penanganan perkara, pemberian pendapat hukum (legal opinion), dan pelaksanaan bantuan hukum, serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian pelayanan informasi, koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dan hubungan masyarakat yang cepat, tepat dan cermat di lingkungan Kanwil.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja 2021 ini kami sajikan dengan sistematika laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyaikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN Balinusra berusaha memberikan pelayanan yang terbaik di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang, Penilaian yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat berpedoman pada visi dan Misi DJKN. Adapun visi DJKN adalah **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mencapai Visi dimaksud Kanwil DJKN Bali Nusra pada Tahun 2022 telah menetapkan Target Kinerja dengan menandatangani Kontrak Kinerja yang tertuang dalam 12 Sasaran Strategis dan 21 Indeks Kinerja Utama (IKU)

B. Visi Dan Arah Kebijakan

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan jajarannya sebagai institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Disamping itu juga terus berupaya melaksanakan pengurusan piutang negara yang berasal dari kementerian/lembaga yang pengurusannya diserahkan ke PUPN/DJKN. Dalam hal pelayanan lelang, terus diupayakan penggalan potensi lelang eksekusi maupun non eksekusi sehingga lelang dapat dikenal dan dijadikan sebagai salah satu sarana transaksi jual beli yang diminati oleh masyarakat.

2. Pelayanan Secara Professional Dan Bertanggungjawab

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang secara professional dan bertanggungjawab mengandung arti bahwa Kantor Wilayah dan jajarannya (KPKNL) dalam melakukan pelayanannya menjunjung etika professional yaitu dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

3. Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat.

Kanwil beserta jajarannya berusaha memberikan layanan terbaik sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai cita-cita dan arah dari pengelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk di dalamnya pengurusan piutang dan optimalisasi layanan lelang.

C. Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan

Visi yang telah dihadirkan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 6 (enam) misi yaitu:

- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
- Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Realisasi Kanwil dan KPKNL dalam melaksanakan misi di atas adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan sistem komputerisasi, pembuatan bukti kepemilikan dan monitoring kekayaan negara;
- Menyediakan informasi jumlah dan nilai riil kekayaan negara;
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan bersaing sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;
- Menjadi *revenue center* dengan memaksimalkan PNBPN, hasil dari pemanfaatan bmn, bea lelang, dan biaya administrasi penagihan piutang negara.

Implementasi terhadap misi yang akan dicapai telah ditetapkan dalam pola dan tujuan. Terdapat 8 (delapan) tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil beserta jajarannya yang meliputi:

- Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi Pemerintah;
- Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
- Peningkatan pelayanan penilaian;
- Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
- Peningkatan pelayanan lelang;
- Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Upaya Kanwil untuk mencapai tujuan tersebut kemudian disusun dalam sasaran strategis yang akan ditempuh dalam suatu periode tertentu. Sifatnya spesifik, dapat dinilai dalam angka, dan berorientasi pada jangka waktu tertentu (1 tahun), yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. yang tinggi atas kebijakan Kepatuhan pengelolaan kekayaan negara;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
9. SDM yang kompetitif;
10. Organisasi yang fit dan porpuse;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;
12. Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Secara keseluruhan Program Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Tahun 2020-2024

D. Penetapan Kinerja

Untuk merealisasikan visi, maka DJKN menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penetapan kinerja Kanwil Bali Nusra Tahun 2022 didasarkan pada peta strategis *Kemenkeu Two* dan berpedoman pada visi dan misi yang diterjemahkan dalam empat perspektif yaitu :

1. *Stakeholder perspective (30%)*

Perspektif yang berkaitan dengan *stakeholder* Kantor Wilayah untuk mengetahui kinerja yang paling utama yang terdiri dari :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap perekonomian	1a-CP	Persentase Penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
		1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%

2. *Customer perspective (20%)*

Perspektif yang berorientasi kepada pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan pada Kanwil yang terdiri dari satker, penyerah piutang dan penanggung hutang, serta pemohon lelang dan pembeli lelang, dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N	Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Kanwil dan KPKNL	4,68

3. Internal Proses perspective (25%)

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam internal organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder* yang meliputi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%
		6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90.00
8	Pengawasan dan pengendalian yang Efektif	8a-Cp	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%

4. Learning and Growth perspective (25%)

Merupakan sumber daya intern Kantor Wilayah yang dimiliki sebagai modal seluruh jajaran untu terus belajar memperbaiki diri dan terus tumbuh dalam melaksanakan kegiatan organisasi yang meliputi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit dan Purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kinerja ZI menuju WBK	75.00
		10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	80
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Balinusra tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Balinusra tahun 2022 sebesar 111,70%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Balinusra

Perspektif	2021		2022	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	25	29,43	30	35,78
Customer	15	16,31	20	21,56
Internal Process	30	34,03	25	27,94
Learning & Growth	30	33,62	25	26,42
TOTAL NKO		112,52		111,70

Catatan Status NKO :

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

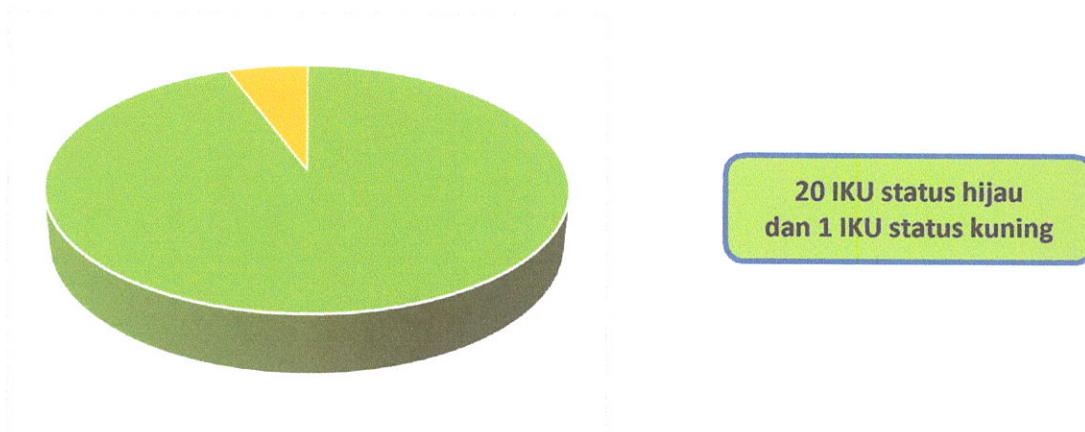
A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2022 Kanwil DJKN Balinusra telah menetapkan 12 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

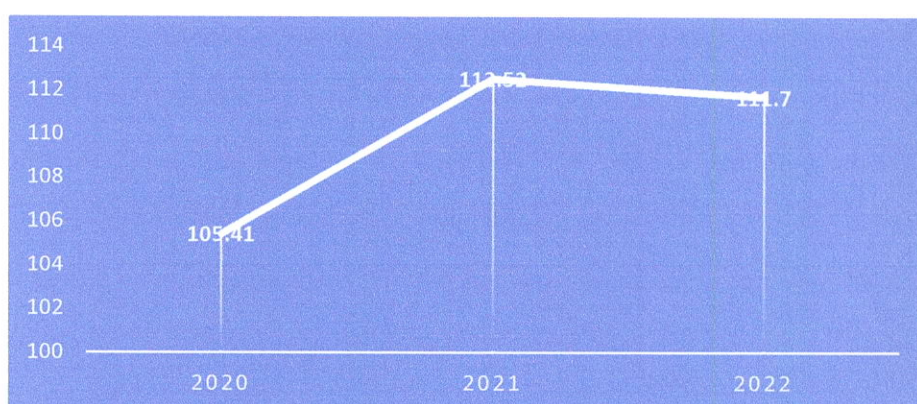
Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Selama tahun 2022, Kanwil DJKN Balinusra memiliki 21 IKU dengan berstatus 20 IKU berwarna hijau dan 1 IKU berwarna kuning. Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN Balinusra tahun 2022 dapat dilihat berikut :

Grafik 3.2



Grafik 3.3
Tren Kinerja NKO Kanwil DJKN Balinusra



Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)				35,78 %	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap perekonomian				117,74%	
1a-CP	Persentase Penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	117,80%	117,80%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	43,84%	120,00%	hijau
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	P/M	80%	100,00%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(20%)				21,56%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				116,64%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	107,18%	107,18%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	149,29%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				100,85%	
3a-N	Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,68	4,77	101,99%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)				27,94%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal				110,31%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	80%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	P/L	100%	104,60%	104,60%	hijau

4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	102,82%	102,82%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	117,60%	117,60%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	1,75%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				104,52%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	98,91%	107,51%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	1,91%	120,00%	
7	Edukasi yang Efektif					
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	96,80	107,56%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian yang Efektif				107,15%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	94,53%	111,21%	hijau
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	103,09%	hijau
Learning & Growth Perspective (25%)					26,42%	
9	SDM yang Kompeten				120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang fit for purpose				118,50%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	P/M	75,00	89,53	119,37%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	94,10	117,63%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal				100,26%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	96,84%	101,40%	hijau
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif				82,82%	
12a-N	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3,55	2,94	82,82	Kuning

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	111,70%	Hijau
--------------------------------	---------	-------

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2022 Kanwil DJKN Balinusra berhasil memperoleh NKO 111,70% dimana capaian dengan nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN Balinusra pada tahun 2022 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap perekonomian

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. Pengurusan piutang negara; dan
3. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Seluruh BMN, KNL (Kekayaan Negara Lainnya), dan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
2. Pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Balinusra meliputi pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset Negara, dan dapat meningkatkan PNBPN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Balinusra mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

Tabel 3.5

SS Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
I	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap perekonomian			117,74%	
	1a-CP	Persentase Penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	117,80%	117,80%
	1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	43,84%	120,00%
	1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100,00%	120,00%

a. (1a-CP) IKU Persentase Penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Isu Utama

Kondisi Perekonomian Masyarakat tahun 2022 belum sepenuhnya pulih dampak dari Pandemi Covid-19. Realisasi Capaian target dari PNBP PN masih terpengaruh dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Namun demikian, dengan perencanaan kerja, melakukan monev capaian kinerja secara intensif, mengidentifikasi BKPN yang berpotensi, serta didukung kerjasama yang baik dan upaya keras dari Kantor operasional realisasi capaian kinerja Q4 PNBP PN Kanwil DJKN Bali Nusra telah melebihi dari *track trajectory*-nya, yakni tercapai 192,88% (dari target *Trajektory* Q4 sebesar 100%).

Implikasi

Berupaya keras untuk optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Akar Masalah

Belum teridentifikasinya dampak covid dalam perekonomian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, guna pencapaian target penerimaan negara.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan Koordinasi secara intensif pada KPKNL di Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, berupa Monev berkala, Pembinaan langsung atau melalui media komunikasi telepon/WAG dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan berikut memberikan solusi apabila ada kendala permasalahan, serta meminta prediksi capaian/prognosa dalam upaya penyesuaiannya dengan track trajectory yang harus dicapai dalam tiap tahapan per Triwulannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

Koordinasi, Pembinaan, Monev, serta meminta prognosa capaian dari hasil identifikasi BKPN berpotensi oleh KPKNL.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target	Realisasi
2022	100%	117,80%
2021	100%	133,77%

b. (1b-CP) Persentase produktivitas lelang

Isu Utama

Produktivitas lelang dinilai dari intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Implikasi

Perbedaan perhitungan beban kerja dengan realisasi pekerjaan.

Akar Masalah

Tidak diperhitungkannya Lelang TAP.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi ke KPKNL di Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui telepon, WAG dalam rangka capaian target.

2. Berkoodinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan PT BRI (Persero) dan PT BTN (Persero) dalam rangka meningkatkan realisasi capaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan terus berkoordinasi dengan Pemohon Lelang (Perbankan) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian IKU

Persentase produktivitas lelang	Target	Realisasi
2022	36%	43,84%
2021	35%	48,94%

- c. **(1c-N) IKU Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM.**

Isu Utama

IKU ini merupakan bagian dari IS RBTK Kemenkeu Tahun 2022 yang mengukur keberhasilan implementasi pelaksanaan Regional Chief Economic (RCE) dan sinergi pemberdayaan UMKM. RCE merupakan perwakilan Kementerian di wilayah regional yang dibentuk dalam rangka kesinambungan fiscal berbasis kewilayahan, bekerja sama dengan seluruh SMV Kemenkeu. DJPb sebagai coordinator teknis pelaksanaan RCE, termasuk pertemuan regular RCE (melibatkan seluruh kantor wilayah di Kementerian Keuangan, SMV, dan unit terkait lainnya). Unit eselon I yang terkait dalam IKU ini adalah BKF, DJA, DJBC, DJKN, DJPK dan DJPPR. Sinergi pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kolaborasi kebijakan dan program seluruh Unit Eselon I, Non Eselon, SMV, serta pembentukan Sekretariat Bersama dipusat yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan dan Sekretariat Bersama di Daerah.

Implikasi

Tingkat keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM.

Akar Masalah

Kendali Tusi di Unit lain

Tindakan yang telah dilaksanakan

Terlibat dalam RCE

Rekomendasi Rencana Aksi
Sinergitas dalam kegiatan tersebut.

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Tabel 3.9
SS . Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			113,59%
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	107,18%	107,18%
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	149,29%	120,00%

a. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Isu Utama

Belum optimalnya pengelolaan.

Implikasi

Menurunnya kepuasan.

Akar Masalah

Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan oleh stakeholder.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan koordinasi ke KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui telepon, WAG dalam rangka capaian target dan koordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan/BUMN.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan koordinasi dengan para KPKNL serta penggalian potensi lelang ke Pemohon Lelang (Perbankan) dan Pejabat Lelang Kelas II di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Realisasi Pokok Lelang		Target	Realisasi
2022		100%	107,18%
2021		100%	162,34%

b. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Isu Utama

Posisi Outstanding Piutang Negara yang dikelola/diurus KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Balinusra, masih tinggi yakni 3.724 BKPN dengan nilai Rp. 11,66 M, perlu dilakukan upaya penurunan tingkat Outstanding Piutang Negara melalui proses pengurusan yang efektif serta optimal dalam penyelesaiannya baik melalui pengelolaan Penyerah Piutang maupun melalui proses pengurusan yang telah diserahkan kepada KPKNL. Dari hasil realisasi capaian kinerja per Triwulan IV (Q4) Penurunan Outstanding PN Kanwil DJKN Bali Nusra telah melebihi dari *track trajectory*-nya, bahkan target tahunannya, yakni tercapai 149,29% (dari target *Trajektori* Q4 sebesar 100%), dengan rincian sbb:

OUTSTANDING PIUTANG NEGARA					
NO	UNIT KERJA	Raw Data Tahun 2022	Realisasi s d Desember 2022	% Capaian 2022	
1	Kanwil Balinusra	7.813.000.000	11.656.366.884	149,19%	
2	KPKNL Denpasar	5.500.000.000	7.615.326.615	138,46%	
3	KPKNL Singaraja	617.000.000	909.013.484	147,33%	
4	KPKNL Mataram	1.200.000.000	1.502.037.782	125,17%	
5	KPKNL Bima	125.000.000	174.651.221	139,72%	
6	KPKNL Kupang	371.000.000	1.455.337.782	392,27%	

Implikasi

Efektivitas Pengurusan.

Akar Masalah

Masih besarnya Outstanding Piutang Negara.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan Koordinasi secara intensif pada KPKNL di Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, berupa Monev berkala, Pembinaan langsung atau melalui media komunikasi telepon/WAG dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan berikut memberikan solusi apabila ada kendala permasalahan, serta meminta prediksi capaian/prognosa dalam upaya penyesuaiannya dengan *track trajectory* yang harus dicapai dalam tiap tahapan per Triwulannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan Koordinasi, Pembinaan, Monev, serta meminta prognosa capaian dari hasil identifikasi BKPN berpotensi untuk KPKNL yang belum memenuhi target secara tahunan.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target	Realisasi
2022	100%	149,29%
2021	100%	112,41%

3. Sasaran Strategis : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Tabel 3.12
SS Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			101,99%
3a-N	Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Kanwil dan KPKNL	4,68	4,77	101,99%

(3a-N) Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL
Isu Utama

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kantor Wilayah tahun 2022 sebesar 4,77 Data hasil perhitungan indek capaian berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan dari Bidang PKN dan KPKNL berdasarkan penyebaran questioner yang disebarakan kepada pengguna layanan kekayaan Negara.

Implikasi

Faktor kepuasan pengguna layanan berpengaruh terhadap hasil kinerja.

Akar Masalah

Meningkatnya tuntutan kepuasan layanan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berupaya meningkatkan pelayanan dan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pengguna layanan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Perbaiki proses bisnis.

Tabel 3.13
Perbandingan IKU

Indeks Kepuasan Peggunan Layanan Kanwil dan KPKNL	Target	Realisasi
2022	4,68	4,77
2021	4,68	4,72

4. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Tabel 3.14
SS Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			110,35%
4a - CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	80,00%	120,00%
4b - CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100 %	104,60%	104,60%

4c - CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100 %	102,82%	102,82%
4d - N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%	117,60%	117,60%

a. (4a – CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Isu Utama

Pelaksanaan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada Satuan Kerja.

Implikasi

Masalah kesesuaian di lapangan dengan standar.

Akar Masalah

Penggunaan BMN yang ada belum mengacu pada SBSK.

Tindakan yang telah dilaksanakan

-

Rekomendasi Rencana Aksi

Sosialisasi dan koordinasi.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target	Realisasi
2022	65%	80,00%
2021	62%	79,59%

b. (4b – CP) Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Isu Utama

1. Satuan kerja lambat dalam menyampaikan dokumen kelengkapan permohonan sertipikasi.
2. Terdapat bidang tanah yang telah ditargetkan tidak dapat di lanjutkan proses sertipikasi.

Implikasi

1. Kantor pertanahan tidak dapat segera melaksanakan proses sertipikasi.
2. Terjadi penggantian lokasi bidang tanah sehingga memerlukan perubahan SK Penlok.

Akar masalah

1. Satker dalam proses kelengkapan berkas dan identifikasi keberadaan fisik bidang tanah yang menjadi target sertifikasi.
2. Bidang Tanah masuk kawasan hutan.
3. Beberapa bidang tanah yang masuk target nominatif dibatalkan oleh satker karena akan melalui program sertifikasi mandiri.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rapat koordinasi dengan Kanwil BPN, KPKNL, dan satker pengguna tanah yang masuk dalam program sertifikasi terkait rencana kerja, mitigasi permasalahan yang ada dan pembahasan alternatif solusi.
2. Monitoring dan Evaluasi ke masing-masing KPKNL setiap bulan.
3. Mendorong Satker dan KPKNL untuk mencari bidang tanah pengganti atas tanah yang tidak dapat di sertipikasi.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melaksanakan rapat koordinasi program sertifikasi BMN Tahun 2022 pada masing-masing wilayah provinsi.
2. Melaksanakan Monev Sertifikasi BMN Tahun 2022 pada masing-masing wilayah
3. Mendorong untuk pelaksanaan prasertipikasi.
4. Verifikasi penambahan target sertifikasi BMN Wilayah NTB.

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	Target	Realisasi
2022	100%	104,60%
2021	100%	103,30%

c. (4c – CP) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Isu Utama

Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya. Kriteria pengakuan capaian yaitu atas BKPN Lunas, Penarikan BKPN, Pengembalian BKPN, dan BKPN PSBDT, serta adanya Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat. Dari hasil realisasi capaian kinerja per Triwulan IV (Q4) untuk Penyelesaian BKPN pada Kanwil DJKN Bali Nusra telah melebihi dari *track trajectory*-nya, yakni tercapai 102,82% (dari target *Trajektori* Q4 sebesar 100%), dengan rincian sbb:

NO UNIT KERJA	BKPN			% Capaian 2022
	Target Tahun 2022	Realisasi sd Desember 2022		
1Kanwil Balinusra	1,314	1,351		102,82%
2KPKNL Denpasar	1,150	1,159		100,78%
3KPKNL Singaraja	50	61		122,00%
4KPKNL Mataram	60	60		100,00%
5KPKNL Bima	10	12		120,00%
6KPKNL Kupang	44	59		134,09%

Implikasi

Menurunnya Outstanding BPKN yang produktif.

Akar Masalah

Belum optimalnya penyelesaian BKPN lama.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Melakukan Koordinasi secara intensif pada KPKNL di Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, berupa Monev berkala, Pembinaan langsung atau melalui media komunikasi telepon/WAG dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan berikut

memberikan solusi apabila ada kendala permasalahan, serta meminta prediksi capaian/prognosa dalam upaya penyesuaiannya dengan track trajectory yang harus dicapai dalam tiap tahapan per Triwulannya.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan Koordinasi, Pembinaan, Monev, serta meminta prognosa capaian dari hasil identifikasi BKPN berpotensi untuk KPKNL yang belum memenuhi target secara tahunan.
2. Kegiatan dilakukan melalui kunjungan langsung atau melalui komunikasi lainnya, melalui chat WA, telepon, dsb).

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Target	Realisasi
2022	100%	102,82%
2021	100%	107,03%

d. (4d – N) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)

Isu Utama

Tidak isu utama hal ini dibuktikan dengan capaian yang telah melampaui yang ditargetkan.

Implikasi

Terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Akar Masalah

Belum optimalnya evaluasi pengelolaan aset.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rapat koordinasi dengan KPKNL melalui zoom meeting penyampaian data target evaluasi kinerja BMN kepada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mendorong KPKNL guna menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN berdasarkan laporan evaluasi tahun 2020-2022.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	Target	Realisasi
2022	100%	117,60%
2021	100%	110,09%

5. Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Tabel 3.19
SS Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	1,75%	120,00%

a. (5a-CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Isu Utama

Tedapat selisih antara nilai persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola BMN dengan nilai wajar hasil penilaian.

Implikasi

1. Berpotensi tidak tercapainya target IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian.
2. Output hasil penilaian Tim Penilai diragukan kewajaran nilainya.

Akar Masalah

Karena nilai yang diajukan oleh Satker dalam permohonan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN di atas harga pasar.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan kaji ulang terhadap semua laporan penilaian yang disampaikan ke kanwil. Salah satu point yang dikaji ulang adalah terkait dengan metodologi penilaian. Sehingga dengan metodologi penilaian yang sudah benar dilakukan oleh Tim Penilai maka hasil penilaian akan mencerminkan Nilai Wajar.
2. Berkoordinasi baik secara non formal maupun formal melalui FGD dan Nota Dinas kepada KPKNL dimana pada intinya Nota Dinas menghimbau kepada para Jabfung Penilai di lingkungan KPKNL untuk menyampaikan permasalahan apabila terdapat kendala yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan IKU tersebut.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengupdate issue / perkembangan terakhir terhadap IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian pada FGD dan pada saat pelaksanaan Verkom Penilai.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian IKU

Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Target	Realisasi
2022	19%	1,75%
2021	22%	4,91%

6. Sasaran Strategis : Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tabel 3.21
SS Edukasi yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			113,76%

6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	98,91%	107,51%
6b-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	1,91%	120,00%

(6a-N) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction.

Isu Utama

Capaian Realisasi Pelaksanaan Lelang E-Aucton dan E-Convensional Auction Triwulan I Kanwil DJKN Bali Nusra, sebagai berikut :

- 1) KPKNL Denpasar 100%
- 2) KPKNL Singaraja 100%
- 3) KPKNL Mataram 100%
- 4) KPKNL Bima 100%
- 5) KPKNL Kupang 100%

Implikasi

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang;
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun;
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif;
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBP lelang ; dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Akar Masalah

Meningkatnya penggunaan sarana IT dalam pelaksanaan lelang.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi ke KPKNL di Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui telepon, WAG dalam rangka capaian target.

2. Koordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan/BUMN dan Pejabat Lelang Kelas II dalam rangka meningkatkan realisasi capaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan Para KPKNL dan Pemohon Lelang (Perbankandi wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian IKU

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Target	Realisasi
2022	91%	98,91%
2021	92%	98,90%

(6b-N) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
2. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. /Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15% Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%"

Isu Utama

Akurasi penyajian Data PNBPN DJKN

Implikasi

Data yang disampaikan harus akurat dan akuntabel.

Akar Masalah

Proses data tidak hanya diperoleh dari satu sumber.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Validasi dan money data.

Rekomendasi Rencana Aksi

Koordinasi data.

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian IKU

Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Target	Realisasi
2022	10%	1,91%
2021	12,5%	3,00%

7. Sasaran Strategis : Edukasi yang Efektif

Tabel 3.24
SS Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Edukasi yang Efektif			107,56%
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90,00	96,80	107,56%

a. (7a-N) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Isu Utama

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Implikasi

Meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN dan mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM pada KPKNL.

Akar Masalah

Beragamnya tingkat pemahaman dan tujuan pengguna layanan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Peningkatan dan perbaikan edukasi dan komunikasi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Penyusunan SOP edukasi dan komunikasi.

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Target	Realisasi
2022	90,00	96,80
2021	90,00	94,07

8. Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Tabel 3.26
SS SDM yang Kompeten

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			107,15%
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	94,53%	111,21%
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	100%	103,09%

(8a – CP) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara**Isu Utama**

Masih terdapat surat persetujuan pengelolaan BMN yang belum ditindaklanjuti.

Implikasi

Namun demikian secara secara IKU tidak berimplikasi karena capaian yang telah melampaui yang ditargetkan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan pengelolaan kekayaan negara.

Akar Masalah

Terdapat calon mitra yang membatalkan karena nilai sewa atau nilai yang disetujui melampaui nilai yang diharapkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Peningkatan koordinasi dengan KPKNL dalam rangka wasdal Pengelolaan BMN, khususnya tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN oleh Kanwil DJKN maupun KPKNL.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPKNL.

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian IKU

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	Target	Realisasi
2022	85%	94,53%
2021	85%	96,29%

(8b – N) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**Isu Utama**

IKU ini ditetapkan untuk Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN yang efektif.

Implikasi

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- Terselesainya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang;
- Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti ;
- Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN ;
- Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Akar Masalah

Pemahaman terhadap parameter pengawasan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap tugas pengawasan pengendalian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Diklat dan penugasan.

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian IKU

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi
2022	97%	100%
2021	97%	100%

9. Sasaran Strategis : SDM Yang Kompeten

Tabel 3.29
SS SDM Yang Kompeten

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	SDM Yang Kompeten			120,00%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%

(9a-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Isu Utama

- 1) Pemanggilan diklat mandatory untuk seluruh pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara ada di Bulan September 2022, seperti e-learning Pendidikan Anti Korupsi (20 JP) .
- 2) Mulai pertengahan Oktober s.d September 2022, setiap hari Kamis diadakan kegiatan internalisasi/sosialisasi selama kurang lebih 2 jam. Berdasarkan SE-28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan internalisasi/sosialisasi dapat dikonversi menjadi 1,3 JP per jam. Implikasinya, menambah jamlat bagi seluruh pegawai yang menghadiri internalisasi.

Implikasi

Implikasi nya dapat menambah jamlat bagi pegawai yang belum memenuhi JP.

Akar Masalah

Prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menyampaikan pemanggilan pelatihan kepada pegawai di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan dan Pendidikan bagi pegawai yang menjadi peserta melalui tautan yang telah dibuat.
3. Melakukan konversi terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh pegawai mengacu pada SE-28/MK.1/2017.

Rekomendasi Rencana Aksi

Monitoring dan evaluasi.

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian IKU

Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Target	Realisasi
2022	100%	120,00%
2021	100%	120,00%

10. Sasaran Strategis : Organisasi yang Fit dan Purpose

Tabel 3.31
SS Organisasi yang Fit dan Purpose

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	Organisasi yang Fit dan Purpose			118,50
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	75,00	89,53	119,37
10b-N	Nilai Review pengelolaan kinerja	80,00	94,10	117,63

(10a – N) Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK

Isu Utama

Meningkatkan citra Kementerian Keuangan dari aspek pemberantasan korupsi.

Implikasi

Menjadikan Institusi Kementerian Keuangan sebagai Zona Berintegritas yang bebas dari Korupsi.

Akar Masalah

Pengulangan proses pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan grativikasi;

2. Membuat Laporan Pelanggaran (Whistleblowing) dan Laporan Layanan Pengaduan setiap bulan;
3. Membuat Laporan Pemantauan Implementasi Benturan Kepentingan setiap bulan;
4. Membuat Laporan Pengendalian Gratifikasi setiap bulan;
5. Membuat laporan Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat setiap bulan;
6. Membuat laporan SPAN Lapor setiap triwulan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Konsisten melaksanakan pemantauan dan pelaporan tindakan pemberantasan korupsi dan gratifikasi.

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian IKU

Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	Target	Realisasi
2022	75,00	89,53
2021	75,00	95,41

(10b – N) Nilai Review Pengelolaan Kinerja

Isu Utama

Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Implikasi

Nilai rewiu tidak sesuai dengan pengelolaan kinerja

Akar Masalah

Pemahaman proses review pengelolaan kinerja.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Sosialisasi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Monitoring dan evaluasi.

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian IKU

Nilai Review pengelolaan kinerja	Target	Realisasi
2022	80	94,10
2021	75	93,54

11. Sasaran Strategis : Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal

Tabel 3.34
SS Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal			101,40
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96,84%	101,40%

(11a-CP) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran**Isu Utama**

Isu utama karena Hal III DIPA dan penyerapan anggaran tidak optimal.

Implikasi

IKU tidak tercapai.

Akar Masalah

Rencana kegiatan dan anggaran yang terealisasi oleh bidang teknis tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga nilai deviasi Hal III DIPA dan penyerapan anggaran di setiap triwulan tidak optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Membuat rencana kegiatan dan anggaran setiap triwulan;
2. Melakukan simulasi perhitungan IKU PKPA;

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai target yang ditetapkan disetiap triwulan;
2. Konsisten dalam membuat rencana penarikan dana agar sesuai dengan Hal III DIPA;
3. Melakukan monitoring pada aplikasi SMART DJA;
4. Melakukan simulasi perhitungan IKU PKPA sampai dengan periode pelaporan.

Tabel 3.35
Perbandingan Capaian IKU

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Target	Realisasi
2022	95,00%	96,84%
2021	95,5%	95,75%

12. Sasaran Strategis : Penguatan Tata kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

Tabel 3.36
SS Penguatan Tata kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
12	Penguatan Tata kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif			82,82%
12a-N	Indek Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	2,94	82,82

(12a-N) Indek Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2022, IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait

Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2022.

Isu Utama

1. Terkait dengan Eksis.
2. Efektivitas komunikasi public.
3. Employe Advokasi.

Implikasi

Untuk mengaplifikasi berita-berita/konten-konten terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Akar Masalah

Mencari berita atau konten terkait kesalahan informasi atau isu-isu negatif di masyarakat.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- a. Melakukan pres release
- b. Konferensi APBN
- c. Mengupload konten-konten atau berita di medsos seperti IG, Youtube, twitter.

Rekomendasi Rencana Aksi

Supaya lebih gencar lagi melaksanakan amplifikasi.

B. Inisiatif Strategis

Pada tahun 2022 Kanwil DJKN Balinusra menetapkan 1 (satu) Inisiatif Strategis (IS) yaitu :

IKU : Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

IS : Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN
Konsep besarnya adalah Ekosistem bisnis di daerah yang mampu menstimulus perekonomian daerah melalui sektor ekspor sehingga terjadi sinergi antara Kanwil DJKN Balinusra, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, KPBC TMP A Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Obyek Optimalisasi :

1. Aset Properti Eks kelolaan PT. PPA yang berlokasi di Jl. Untung Surapati No. 14, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

a. Rencana Proyek Optimalisasi

Objek optimalisasi aset adalah Aset Properti Eks kelolaan PT. PPA yang berlokasi di Jalan Untung Surapati No, 14, Klungkung, dengan luas tanah sebesar 400 m² dan luas bangunan 492 m² dengan skema Pemanfaatan melalui Pinjam Pakai dengan jangka waktu 5 tahun. Objek tersebut nantinya akan digunakan sebagai Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasnada), Pusat Pelatihan dan Galeri UMKM Kabupaten Klungkung.

b. Progres Kegiatan

Program optimalisasi telah dilaksanakan pinjam pakai sejak tahun 2020. Sedangkan keberlangsungan kegiatan dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi pembangunan fisik gedung bangunan objek optimalisasi dan esensi kegiatan untuk menggerakkan UMKM agar dapat melaksanakan ekspor secara mandiri.

- Dari sisi fisik gedung dapat disampaikan sebagai berikut bahwa berdasarkan uji kelayakan fisik dari Dinas PU Kabupaten Klungkung dan civitas akademika Teknik Sipil Udayana bahwa objek optimalisasi dibangun tahun 1987 tidak pernah mengalami renovasi sehingga bangunan mengalami lelah konstruksi dan ditemukan banyak retak dan pecah pada bagian konstruksi bangunan. Sehingga bangunan tidak layak untuk dipergunakan.
- Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Klungkung untuk merenovasi bangunan objek optimalisasi telah terbitnya DIPA tahun 2021 untuk pembangunan gedung baru senilai Rp. 2 M
- Sedangkan untuk esensi pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan kegiatan *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kegiatan CPNE dilakukan baik secara *online* maupun *offline* dan juga telah dilaksanakan kegiatan Ekspor itu mudah oleh KPP BC Denpasar dan sosialisasi Lelang UMKM oleh KPKNL Denpasar.
- Selain itu dalam pemberdayaan UMKM, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menginisiasi lahirnya Desa Devisa Uyah Kusamba. Desa Devisa adalah Desa yang berbasis *community Development* dimana terdapat produk unggulan dari kelompok masyarakat yakni petani garam dengan menghasilkan garam yang nantinya garam tersebut akan diekspor.

c. Kendala/Akar Masalah

Adanya Pandemi membuat program optimalisasi asset tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan. Yakni pembangunan gedung menjadi terlambat. Hal ini karena adanya pandemi sehingga penerimaan utama dari Pemkab Klungkung yang berasal dari sector pariwisata menjadi sangat terpengaruh dan turun drastis. Penurunan pendapatan ini menyebabkan Pemkab Klungkung harus memilih dan memilah dalam pembelanjaan APBD nya, sehingga DIPA pembangunan gedung dekrasnada mengalami refocusing dan tidak dapat dibangun pada tahun 2021.

Meskipun demikian kegiatan pemberdayaan UMKM sebagai esensi dari kegiatan optimalisasi asset ini tetap berjalan dan berlangsung dan memunculkan UMKM baru yang siap ekspor dan terciptanya Desa Devisa Uyah Kusamba

d. Output

Output dari kegiatan ini dapat dilihat dari 2 aspek, yakni

1. Dari sisi fisik gedung

Dengan program optimalisasi asset ini, DJKN tidak perlu mengeluarkan biaya untuk waker dan pihak Pemda Klungkung juga dapat menghemat biaya untuk sewa Gedung atau Kantor Dekranasda

2. Dari sisi esensi Kegiatan

▪ Terciptanya Desa Devisa Uyah Kusamba

Pada akhir Bulan Oktober 2021 Desa Devisa Uyah Kusamba ditetapkan menjadi desa Devisa. Ini merupakan Desa Devisa yang kelima di Indonesia dari sekitar 72 ribuan desa yang ada di Indonesia. Ditargetkan pada triwulan pertama tahun 2022, Desa Devisa Uyah Kusamba akan melakukan ekspor perdana ke negeri Belanda. Dengan didampingi LPEI, para petani uyah kusamba diberikan pelatihan *seasalt* untuk diversifikasi produuk mereka, pendampingan ini dilakukan oleh Chef Ragil

▪ Lahirnya UMKM Baru yang siap Ekspor

Selama ini UMKM di Kabupaten Klungkung telah melakukan ekspor dengan menggunakan jasa trader. Dengan adanya pelatihan CPNE dan Ekspor itu mudah maka para UMKM diharapkan dapat melakukan ekspor secara

mandiri. Adapun untuk UMKM yang sudah melakukan ekspor, maka LPEI siap membantu untuk membuka pasar ekspor yang baru.

C. Realisasi Anggaran

DIPA Kanwil DJKN Balinusra tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.2.028.171.000,- dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp.1.785.830.690,- sehingga saldo Rp.242.340.310,- dan telah disetor Kembali ke kas Negara.

Isu utama dalam kualitas anggaran ini adalah adanya peraturan dari Ditjen Perbendaharaan nomor : Per- 4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2021 berisi tentang pengaturan IKPA ReAktivasi dimana beberapa dari 13 indikator IKPA tidak dilakukan penilaian (exp.Revisi DIPA dan Deviasi Hal. III DIPA), masih terdapat saldo yang cukup banyak apda triwulan IV tahun 2022, sedangkan salah satu komponen perhitungan IKPA ReAktivasi adalah Penyerapan Anggaran, kemudian perhitungan IKU PKPA pada triwulan IV menggunakan komposisi IKPA ReAktivasi (60%) dan SMART DJA (40%).

Adapun kendala dalam pencapaian IKU adalah :

- a. Terkait saldo yang menumpuk di Triwulan IV disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19 dan Managemen Perencanaan Kerja/Kegiatan yang terkait dengan anggaran yang tersedia di DIPA;
- b. Terakit dengan Aplikasi OM-SPAN dan SMART-DJA, kewenangan berada pada DJPb dan DJA.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Revisi Kewenangan KPA demi terlaksanakannya penyerapan Anggaran yang optimal;
2. Berkoordinasi secara intensif dengan KPKNL Denpasar, Singaraja, Mataram, Bima, Kupang dan Bagian Keuangan KP DJKN terkait aplikasi OM-SPAN dan SMART-DJA.
3. Bersinergi yang efektif terkait Capaian Output bidang teknis dengan bagian umum, sehingga penginputan capaian output pada aplikasi Sakti dapat dilaksanakan lebih cepat.
4. Untuk pelaksanaan Anggaran telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (korwas) secara rutin setiap awal bulan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Balinusra Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau Sasaran Strategis Tahun 2022. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Balinusra yang dilakukan dalam Tahun 2022 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Guna mengimplementasikan optimalisasi tercapainya kinerja maka peran Kanwil DJKN Balinusra dalam membangun citra baik bagi *stakeholders* sangat diharapkan.

Dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusatenggara menggunakan Pengukuran kinerja dalam *BSC* merupakan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) SS dan dijabarkan kedalam 21 IKU sebagaimana yang telah tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Balinusra Tahun 2022, capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan pendekatan *BSC*, mendapatkan rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 111,70 % sesuai tabel sebagai berikut :

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2022

Kode	KU	V/C	Target Q4	Realisasi Triwulan IV	Bobot Awal	Bobot Akhir KU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective (30%)									
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian									
1a-CP	Persentase Pemenuhan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	117,80%	14%	3%	117,80%	117,80%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	10%	43,84%	14%	3%	171,79%	170,00%	hijau
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCT dan pengembangan UMMK	P/M	80%	100,00%	14%	13%	175,00%	170,00%	hijau
Customer Perspective (20%)									
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa									
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	107,18%	14%	50%	107,18%	107,18%	hijau
2b-CP	Persentase Pemenuhan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	149,79%	14%	50%	149,79%	170,00%	hijau
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi									
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kamal dan KPRNI	P/M	4,58	4,77	21%	100%	101,99%	101,99%	hijau
Internal Process Perspective (25%)									
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal									
4a-CP	Tingkat Kesuksesan Penggunaan BMN dengan SBM	P/M	85%	86%	14%	14%	172,64%	170,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang diertibatkan	P/I	100%	104,60%	19%	13%	104,60%	104,60%	hijau
4c-CP	Persentase Penyetoran Berkas Kasus Piutang Negara (BAPN)	P/M	100%	107,87%	14%	14%	107,87%	107,87%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (post-fokusi-art)	P/I	100%	117,66%	11%	19%	117,66%	117,66%	hijau
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional									
5a-CP	Deviasi ketepatan hasil penilaian	P/M	19%	1,75%	14%	100%	190,75%	170,00%	hijau
6. Penguatan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif									
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional-auction	P/M	97%	98,91%	14%	50%	107,51%	107,51%	hijau
6b-N	Deviasi Data PMRP Fungsional DJKN	P/M	19%	1,91%	14%	50%	140,94%	170,00%	hijau
7. Edukasi yang Efektif									
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	96,80	14%	100%	107,56%	107,56%	hijau
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif									
8a-CP	Persentase tindak lanjut pemenuhan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	94,53%	14%	50%	111,21%	111,21%	hijau
8b-N	Pertambahan rekomendasi hasil Pengawasan yang diindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	14%	50%	103,09%	103,09%	hijau
Learning & Growth Perspective (25%)									
9. SDM yang Kompeten									
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10. Organisasi yang Fit for Purpose									
10a-N	Kelembagaan dan Upr. Kerja terhadap Kriteria 7 menurut ANK	P/M	75,00	89,53	14%	50%	119,47%	119,47%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	94,10	14%	50%	117,63%	117,63%	hijau
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal									
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	96,84%	18%	100%	101,40%	101,40%	hijau
12. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dalam Ekosistem Kolaborasi									
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kelembagaan	P/M	5,55	5,94	14%	100%	87,87%	87,87%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,70%	hijau

Capaian kinerja yang tertuang dalam Lakin harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, dan juga harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kanwil dan KPKNL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat melalui pemberian pelayanan yang lebih optimal.